

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Masyarakat hidup secara berkelompok dalam suatu kesatuan sistem sosial atau organisasi. Salah satu bidang dalam organisasi yaitu bidang politik (Wirawan, 2014). Menurut Yukl (dalam Wirawan, 2014) proses politik adalah upaya dari anggota organisasi untuk meningkatkan suatu jabatan yang ada. Keterlibatan perempuan dalam politik merupakan kegiatan perseorangan maupun secara berkelompok untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memimpin negara, di bidang legislatif, maupun eksekutif, baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik. Diskursus dan eksistensi mengenai perempuan terlibat dalam politik memang telah diakui sejak lama. Seiring dengan perkembangan jaman yang semakin pesat dengan berbagai isu mengenai kesetaraan gender bergema dimana-mana meningkatkan kesadaran kaum perempuan untuk sejajar dengan kaum laki-laki di berbagai sektor kehidupan, terutama di sektor publik di satu sisi hadirnya perempuan untuk berpartisipasi dalam bidang politik merupakan salah satu indikasi kemajuan dan kualitas demokrasi sebuah bangsa (Fakih, 2008). Akan tetapi, dalam kenyataannya perempuan selalu minoritas atau marjinal dan keterwakilannya rendah, seolah dunia politik bukan dunia perempuan, meskipun iklim yang berkembang memberikan peluang.

Hasil perolehan kursi di parlemen pada tahun (1955-1959) perolehan kursi perempuan di parlemen sebanyak 5,1 % atau 25 orang dari 488 orang. Pada

tahun (1971-1977) perempuan memperoleh kursi 7,8 % atau 36 orang. Pemilu tahun 1977 perempuan memperoleh kursi 6,3% atau 29 kursi. Pemilu tahun 1982 perempuan memperoleh kursi 8,5% atau 39 kursi dari 460 kursi pada tiga periode. Pemilu 1987 perolehan kursi meningkat yaitu 13% atau 65 kursi dari 500 kursi. Pemilu 1992-1997, perolehan kursi perempuan 12, 5% atau 62 kursi, 1997-1999 perolehan kursi perempuan 10,8% atau 54 kursi, 1999-2004 perolehan kursi menurun 9% atau 46 kursi dari 500 kursi. Pemilu 2009 perempuan memperoleh kursi 17,68% atau 99 kursi dari 560 kursi (Subono, 2009).

Didukung oleh hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 10 Mei 2016, wawancara dilakukan pada 10 orang laki-laki dan 10 orang perempuan, didapatkan hasil sebagai berikut; Dari kesepuluh orang laki-laki tersebut 5 diantaranya mengatakan bahwa perempuan mampu menjadi pemimpin yang baik dan sekarang juga banyak perempuan yang berkompeten untuk menjadi pemimpin sekalipun dibidang politik dan 5 antaranya lagi mengatakan bahwa biar bagaimanapun kompetennya seorang perempuan dirinya belum pantas untuk menjadi pemimpin karena, perempuan itu lemah mainnya perasaan. Dari kesepuluh orang perempuan tersebut rata-rata memilih pemimpin laki-laki dengan alasan pemimpin laki-laki lebih berkompeten, lebih tangguh dari pada perempuan serta mengingat perempuan sangat jarang aktif dalam berorganisasi selain itu perempuan lemah-lembut, cantik, emosional, atau keibuan; sementara laki-laki itu kuat, rasional, jantan dan perkasa. Hal seperti ini pada akhirnya memunculkan prasangka yang mendomestikasi perempuan, akibatnya perempuan mengalami marginalisasi, dan subordinasi dengan kaum laki-laki. Indonesia

memiliki budaya patriarki yang mengatakan bahwa perempuan itu seharusnya tidak bekerja di sektor publik tapi hanya di sektor domestik (Budiman, 1985). Selain itu menurut Napsiah (Sastriyani, 2009) sebagian masyarakat cenderung masih mengharapkan pekerjaan laki-laki dan perempuan dapat sesuai dengan peran seksnya selain itu adanya terminologi publik dan privat yang erat ikatannya dengan konsep gender, peran gender, dan prasangka telah menciptakan fenomena ketidakadilan dan ketidaksetaraan perempuan.

Dari sejumlah sifat-sifat/ karakteristik yang dikonstruksi secara sosial serta pola-pola kekuasaan kaum pria yang otoriter pada semua bidang kehidupan mengakibatkan terbatasnya partisipasi kaum wanita dalam aktivitas kehidupan di luar lingkungan keluarga dan menimbulkan sebuah prasangka terhadap kepemimpinan perempuan dalam politik. Lebih lanjut Wirawan (2014) mengatakan bahwa seorang pemimpin identik dengan laki-laki. Hal ini didukung hasil penelitian dari Ismatulloh (2014) yang menyatakan sebagian besar masyarakat cenderung setuju sebanyak 64,87% dengan ungkapan yang menyatakan bahwa pemimpin haruslah seorang laki-laki, dari 64,87% yang setuju mengatakan perempuan laki-laki dilihat dari segi fisik dan kejiwaannya lebih kuat dari perempuan, sehingga mampu menahan semua cobaan selain itu laki-laki lebih berwibawa dari pada perempuan, baik dalam menghadapi masalah, berbicara, berfikir dan berpenampilan. Pandangan-pandangan seperti ini berdampak terhadap kaum perempuan hanya digambarkan sebagai objek yang pasif dari pada sebagai manusia yang bertindak sebagai subjek di berbagai negara selain itu dapat memunculkan sebuah kriminalitas, kebencian (Baron dan Bryne, 2004).

Baron dan Byrne (2004) mendefinisikan prasangka sebagai sebuah sikap yang negatif terhadap anggota kelompok tertentu, berdasarkan keanggotaan mereka dalam kelompok tersebut. Brown (2005) menyatakan bahwa prasangka sering kali didefinisikan sebagai penilaian negatif yang salah atau tidak berdasar mengenai anggota suatu kelompok, tetapi, definisi semacam itu menimbulkan kesulitan konseptual karena ada masalah pemastian apakah penilaian sosial itu memang salah atau sekedar menyimpang dari kenyataan. Lebih lanjut Chaplin (2004), prasangka adalah: Satu sikap, baik positif maupun negatif, yang telah dirumuskan sebelumnya agar bisa memberikan cukup bukti dan diperhatikan dengan kegigihan emosional; Satu kepercayaan atau pendapat, biasanya tidak baik, yang mempengaruhi individu untuk bertindak laku dengan cara tertentu atau berpikiran dengan cara tertentu mengenai orang lain. Jadi, dapat disimpulkan prasangka adalah sikap yang negatif terhadap suatu kelompok

Kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai pemimpin. Pemimpin adalah tokoh atau elit anggota sistem sosial yang dikenal oleh masyarakat dan berupaya memengaruhi para pengikutnya secara langsung atau tidak langsung (Wirawan, 2014). Lebih lanjut menurut Bass dan Avolio (1998) mendefinisikan kepemimpinan sebagai suatu usaha untuk mempengaruhi orang lain yang berada dalam suatu kelompok atau organisasi untuk mencapai sasaran tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Menjadi seorang pemimpin yang efektif mampu meningkatkan kesadaran diri, memahami kekuatan sekaligus kelemahan yang dimiliki, yakin terhadap kapabilitas diri sendiri, selain itu para pemimpin harus berpikir positif tentang dirinya sendiri sebelum berpikir positif tentang orang-

orang yang ada dibawahnya selain itu memimpin berarti mempengaruhi, memandu baik secara langsung maupun tidak langsung, melatih, action dan memberikan masukan (Nanus dalam Munandar, 2001). Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah seorang pemimpin yang mampu mempengaruhi dan membimbing orang lain atau kelompok tertentu menuju pencapaian tertentu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah elit anggota sistem sosial yang berada dalam suatu kelompok atau organisasi sebagai salah satu usaha untuk mempengaruhi orang lain untuk mencapai sasaran tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kepemimpinan perempuan dalam politik adalah keterlibatan atau terwakilnya perempuan dalam politik (Agustina dalam Sastriyani, 2009). Menurut Asfar (Hadiz, 2004) kepemimpinan perempuan dalam politik adalah seorang perempuan yang memperjuangkan kepentingan umum maupun kepentingan kelompok dalam politik baik dibidang DPR/MPR maupun DPD. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan perempuan dalam politik adalah keterlibatan atau terwakilnya perempuan dalam politik untuk memperjuangkan kepentingan umum maupun kelompok.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan prasangka kepemimpinan perempuan dalam politik ialah sikap, emosi atau perilaku sebagai penilaian negatif terhadap anggota kepemimpinan perempuan dalam ranah politik baik yang sedang memperjuangkan kepentingan umum maupun yang baru hendak terlibat didalamnya.

Menurut W.J.Thomas (Ahmadi, 2009) berpendapat prasangka mempunyai 3 macam aspek yakni, aspek kognitif, aspek afektif, aspek konatif. aspek kognitif seperti keyakinan, persepsi, informasi tentang sifat pribadi yang dimiliki orang dalam kelompok atau kategori tertentu; aspek afektif seperti proses yang menyangkut perasaan-perasaan tertentu seperti ketakutan, kedengkian, simpati, antipati, suka dan tidak suka; aspek konatif perilakunya kecenderungan memberi pertolongan, menjauhkan diri dari kelompok yang diprasangkainya. Adapun dalam penelitian ini, peneliti akan mengabungkan dua aspek yakni aspek dari prasangka dan kepemimpinan. Aspek prasangka dalam penelitian yang dipilih yakni aspek dari W.J. Thomas (Ahmadi, 2009) sedangkan aspek kepemimpinan adalah dari wirawan.

Adapun beberapa faktor yang dapat ditunjukkan atau yang dapat diprasangkai yaitu antara lain: usia; asal geografis; pekerjaan; kelebihan berat badan; ras; gender; latar belakang etnis (Baron dan Bryne, 2004). Selain itu pada kausal juga memberikan perhatian yang sepantasnya pada berbagai kekuatan kekuatan historis, politis, ekonomis dan sosial kultural yang tercampur aduk secara kompleks dalam suatu konteks prasangka tertentu (Brown, 2005). Dari beberapa faktor diatas, salah satu faktor yang dapat menimbulkan prasangka atau yang dapat membentuk terjadinya sebuah prasangka adalah faktor gender. Salah satunya adalah peran gender. Pemilihan faktor tersebut berdasarkan pertimbangan secara konseptual gender, peran gender terbentuk dari pola hubungan sosial laki-laki dan perempuan dalam berbagai masyarakat yang berbeda dan gender sebagai pembeda antara laki-laki dan perempuan (Fakih, 2008).

Peran yang diberi oleh masyarakat berbeda-beda sesuai dengan jenis kelaminnya seperti; laki-laki memiliki peran (mencari nafkah bagi keluarga), sedangkan perempuan memiliki (melakukan kerja rumah tangga, mengasuh anak) dianggap khas sebagai milik perempuan. Apabila perempuan keluar untuk mencari nafkah atau bekerja diluar rumah, maka dianggap sebagai mengingkari kodratnya. Begitu pula dengan lelaki yang mengerjakan peran perempuan dengan melakukan kerja rumah tangga juga dianggap mengingkari kodratnya bahkan bisa dianggap sakit karena bertindak tidak sesuai dengan harapan masyarakat (Suwarno, 2004). Dari sinilah awal mula peran gender dapat menimbulkan sebuah prasangka yakni adanya pembagian peran laki-laki dan perempuan berdasarkan seks dan hal ini telah berlangsung selama ribuan tahun bermula sejak zaman dulu (Beauvoir, 1989). Seperti perempuan diharapkan berada di rumah mengerjakan pekerjaan domestik seperti memasak, merawat anak, membersihkan dan mengurus serta menata rumah. Sementara laki-laki bekerja mencari nafkah (Sriwijono, 2006 dalam Lestari, 2016).

Istilah peran gender tidak akan lepas dari pengaruh perbedaan biologis (jenis kelamin atau *sex*) pada laki-laki dan perempuan. Perbedaan biologis laki - laki dan perempuan adalah alami (*nature*) dari sinilah membentuk sifat peran gender (maskulin dan feminin) yang mengacu pada dimensi sosial budaya seseorang sebagai laki-laki dan perempuan. Pada umumnya gender disebut juga sebagai jenis kelamin namun, gender dan jenis kelamin merupakan sesuatu yang begitu berbeda. Jenis kelamin yakni sesuatu yang berhubungan dengan laki-laki (maskulin) dan perempuan (feminin) (Nugroho, 2008). Lebih lanjut Santrock

(2003) mengatakan bahwa peran gender merupakan seperti apa seharusnya dan bagaimana seharusnya dilakukan, dirasakan dan dipikirkan oleh individu sebagai maskulin dan feminin.

Dalam masyarakat tradisional yang menganut sistem patriarki sifat yang diyakini dalam masyarakat lama seperti maskulin (berani, kasar, tegas), aktivitas maskulin (gemar olahraga), dan peran maskulin (mencari nafkah bagi keluarga) dianggap khas milik laki-laki, sedangkan sifat feminin (takut, lembut, penurut), aktivitas feminin (menari, memasak), dan peran feminin (melakukan kerja rumah tangga, mengasuh anak) dianggap khas sebagai milik perempuan. Oleh karena itu apabila perempuan mengembangkan maskulinitasnya dengan mencari nafkah atau gemar berolahraga maka dianggap sebagai mengingkari kodratnya. Begitu pula dengan lelaki yang mengembangkan femininitasnya dengan berhias atau melakukan kerja rumah tangga juga dianggap mengingkari kodratnya bahkan bisa dianggap sakit karena bertindak tidak sesuai dengan harapan masyarakat (Suwarno, 2004). Sesungguhnya sifat, aktivitas maupun peran tersebut merupakan hasil dari konstruksi dari masyarakat itu sendiri (Fakih, 2008). Pada kenyataannya banyak orang yang mengalami penderitaan psikis karena terikat sebagai laki-laki atau perempuan saja seperti telah digariskan oleh masyarakat, karena apabila laki-laki dan perempuan tidak dapat bertindak seperti yang diharapkan masyarakat, kita dianggap sakit, kebencian (Baron dan Bryne, 2004). Dari model inilah, aspek maskulin dan feminin itu digunakan untuk mengukur dan mendeskripsikan sejauh mana seseorang melibatkan karakteristik tradisional (Bem, 1974 dalam Baron dan Bryne, 2004).

Dari peran gender inilah dapat menjelaskan sejauh mana seseorang menganggap dirinya sebagai feminin dan maskulis sebagaimana yang telah ditentukan oleh jenis kelamin (Nugroho, 2011). Akan tetapi, dari peran gender muncul kesenjangan-kesenjangan akses, hak, dan peran perempuan dalam politik bila dibandingkan dengan kaum laki-laki dengan masih minimnya kuantitas serta kualitas perempuan dalam jabatan publik yang bisa memperjuangkan baik kepentingan perempuan sendiri maupun kepentingan rakyat banyak. Masih sedikit perempuan yang menduduki jabatan publik dan mampu berperan aktif dalam kehidupan politik. Bahkan lebih banyak yang kemudian menilai bahwa naiknya perempuan dalam jabatan publik tersebut tidak terlepas dari pengaruh laki-laki (Cahyadi, 2002).

## **B. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara prasangka terhadap kepemimpinan perempuan dalam politik dan peran gender. Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis adalah :

### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan penelitian ini menjadi sumber informasi atau referensi baru mengenai hubungan antara peran gender dengan prasangka kepemimpinan perempuan dalam politik serta dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu psikologi khususnya psikologi sosial, mengenai hubungan antara peran gender dengan prasangka terhadap kepemimpinan perempuan dalam politik.

## 2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini berguna memberi pemahaman seputar peran gender dan prasangka kepemimpinan perempuan dalam politik selain itu penelitian ini diharapkan dapat membantu memecahkan permasalahan praktis.